LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 75-84
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.524

Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Malang
(Studi di Desa Pujon Kidul)

Fransiska Noviyanti[1*], Ignatius Adiwidjaja[2], Nanang Bagus[3]
[1,2,3]Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract
The tourism sector plays a significant role in improving the economy and community welfare through the development of tourism villages based on local potential. Pujon Kidul Tourism Village in Malang Regency is one of the developing tourism villages; however, the implementation of its development policies still faces several constraints, such as limited human resources, budget limitations, and inadequate tourism supporting facilities and infrastructure. This study aims to analyze the implementation of tourism village development policies in Pujon Kidul. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, with informants selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using an interactive model. The results indicate that policy implementation has been effective, although not yet optimal. Based on the theory of George C. Edward III, aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have supported policy implementation, although constraints related to limited resources and supporting facilities still exist. Supporting factors include synergy among stakeholders, alignment of vision and mission, and community participation, while inhibiting factors include limited budget, the quality of human resources, and inadequate infrastructure. The study concludes that policy implementation has been effective; however, further optimization is required to ensure the sustainability of tourism village development.

Keywords:
Policy Implementation, Tourism Village, Pujon Kidul

Article History
Received 01 August 2026
Accepted 24 October 2026

***Corresponding Author:**
fransiskanoviant770i@gmail.com

Pendahuluan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjanjikan karena mampu meningkatkan pendapatan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional (Naibaho et al.,2023). Selain itu, pariwisata juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan wilayah secara berkelanjutan (Pitana & Gayatri, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata merupakan berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Pengembangan pariwisata merupakan upaya yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi wisatawan maupun masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata merupakan upaya yang bertujuan memberikan manfaat bagi wisatawan maupun masyarakat setempat melalui

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 75-84
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.524

pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang meliputi keragaman budaya, seni, dan alam sebagai daya tarik wisata (Puansah, 2023:18).

Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia modern yang menuntut manusia untuk senantiasa beraktivitas dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ketersediaan waktu luang menjadi sedikit. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap psikologis masyarakat, terlebih lagi masyarakat urban di perkotaan yang kesehariannya sibuk dengan pekerjaannya, sehingga sesekali membutuhkan perjalanan wisata untuk melepaskan diri dari rutinitas dan melakukan refreshing (Sari, 2022). Kondisi ini mendorong berkembangnya berbagai bentuk pariwisata, salah satunya adalah desa wisata.

Desa wisata merupakan konsep pengembangan desa berbasis potensi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Naibaho et al., 2023). Desa wisata juga dipahami sebagai bentuk pengembangan pariwisata yang menekankan peran Masyarakat dalam pelestarian lingkungan (Fandeli et al., 2013, dalam Noviarita et al., 2021). Keberadaan desa wisata diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup beserta lingkungan. Pengembangan desa wisata merupakan upaya untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya desa, agar dapat menjadi daya tarik wisata dengan memperhatikan karakteristik wilayahnya (Nugroho, 2022). Dukungan terhadap pengembangan desa wisata juga diperkuat melalui kebijakan pemerintah, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kebijakan pembangunan desa juga tercermin dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan desa (Krisnawati, 2021).

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan (Agustino, 2017). Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses untuk melihat hasil dan dampak setelah suatu kebijakan diterapkan (Syahruddin, 2019:34). Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan tertentu melalui proses perumusan hingga evaluasi kebijakan (Dunn, 2018). Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata adalah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki kondisi topografi yang beragam, mulai dari wilayah dataran rendah hingga dataran tinggi, yang menjadikannya memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata alam. Salah satu desa yang berhasil mengembangkan potensi tersebut adalah Desa Wisata Pujon Kidul yang terletak di Kecamatan Pujon. Desa ini dikenal dengan wisata berbasis pertanian dan alam yang dikelola oleh masyarakat desa, seperti agrowisata dan Café Sawah yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Keberhasilan pengembangan desa wisata di Pujon Kidul tidak terlepas dari adanya visi dan misi pembangunan desa yang secara tegas diarahkan pada penguatan potensi lokal berbasis pariwisata, yaitu “Terwujudnya Desa Wisata Pujon Kidul yang Maju dan Mandiri”. Untuk mencapai visi tersebut, misi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pujon Kidul antara lain mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun infrastruktur desa, mengembangkan potensi desa, serta membangun pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, Desa Pujon Kidul juga memiliki berbagai potensi wisata yang menjadi daya tarik dalam pengembangan desa wisata. Adapun potensi wisata yang terdapat di

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 75-84
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.524

Desa Pujon Kidul dapat dilihat paad table berikut:

Tabel.1. Jenis Wisata pada Desa Pujon idul

No.	Nama Wisata	Jenis Wisata
1	Café Sawah	Wisata alam dan kuliner
2	Kampung Budaya	Wisata budaya dan edukasi
3	Pusat Olahan Susu	Wisata edukasi
4	Punden R.A.Karsinah	Wisata religi/sejarah
5	Agrowisata Pertanian	Wisata petik sayur dan buah

Sumber: Data Sekunder, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Desa Pujon Kidul memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, budaya, edukasi hingga religi. Keberagaman ini menunjukkan bahwa desa memiliki daya tarik yang kuat untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis potensi lokal. Namun, dalam pengembangannya masih terdapat kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti keterbatasan Sumber daya, dan sarana prasarana. Dengan adanya potenssi dan kendala tersebut, peran pemerintah daerah menjadi penting dalam mendukung pengembangan desa wisata.

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki peran dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul melalui kebijakan, pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi promosi pariwisata. Dukungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata serta mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Sementara itu, sumber pendanaan pengembangan desa wisata sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa, serta pengelolaan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meskipun demikian, pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul menunjukkan perkembangan yang pesat, dalam implementasi kebijakan masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan. Secara ideal, pengembangan desa wisata diharapkan berjalan optimal dengan dukungan sumber daya yang memadai, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang menunjang. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap konsep desa wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan serta faktor-faktor yang memengaruhinya di lapangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul berdasarkan teori George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:25), metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Lokasi penelitian dipilih karena Desa Pujon Kidul merupakan salah satu desa wisata yang berkembang dan menjadi contoh implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Kabupaten

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 75-84
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.524

Malang. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berdasarkan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumen terkait. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang meliputi Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan Ketua Pokdarwis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi (Miles & Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Di Desa Wisata Pujon Kidul

Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, BUMDes, dan Pokdarwis. Menurut Budi Winarno (2016:33), implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan, karena kebijakan harus diimplementasikan agar dapat diketahui dampak serta pencapaian tujuan yang diinginkan. Dikutip dari Setyawan (2017:91–92), Makmur dan Thahier (2016:36) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai proses pemikiran dan tindakan yang direncanakan secara rasional, efisien, dan efektif dalam rangka mewujudkan keteraturan serta ketertiban dalam pelaksanaan tugas negara atau pemerintahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III**,** sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho dalam Setyawan (2017:126), yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi**.**

Berdasarkan kerangka teori tersebut, implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari aspek perumusan kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan diitngkat desa. Dalam konteks Desa Wisata Pujon Kidul, implementasi kebijakan pengembangan desa wisata merupakan proses yang melibatkan interaksi antara pemerintah Kabupaten Malang sebagai pembuat kebijakan, pemerintah desa sebagai oarng yang mengetahui secara langsung kebijakan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Malang, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola operasional, Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pengembangan Desa Wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul telah berjalan dan memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Hal ini ditandai dengan berkembangnya berbagai unit usaha wisata, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta pemerataan pemahaman masyarakat terhadap konsep desa wisata. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini difokuskan pada empat aspek utama menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana kebijakan

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 75-84
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.524

pengembangan desa wisata dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di Desa Pujon Kidul.

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yang mencakup penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi dalam penyampaian kebijakan kepada para pelaksana maupun kepada masyarakat. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C.Edward III, komunikasi yang efektif sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan tujuan dan arah kebijakan kepada para pelaksana di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyampaian informasi terkait kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Informasi yang diberikan meliputi tujuan pengembangan desa wisata, rencana program, serta pembagian peran masing-masing pihak. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator, sedangkan BUMDes dan pokdarwis sebagai pelaksana kegiatan wisata.

Dari aspek kejelasan informasi, para pelaksana utama seperti BUMDes dan Pokdarwis telah memahami tujuan, pembagian peran, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif BUMDes dalam pengelolaan unit wisata serta peran pokdarwis dalam pelaksanaan kegiatan wisata. Namun, pemahaman masyarakat secara umum belum merata, dikarenakan sebagian masyarakat hanya mengetahui adanya aktivitas wisata tanpa memahami arah kebijakan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah berjalan dengan melibatkan berbagai pihak. Sesuai dengan teori George C. Edward III, kejelasan dan konsistensi informasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sementara itu, dari aspek konsistensi, komunikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. Hal ini menunjukan bahwa komunikasi kebijakan telah berjalan dengan melibatkan berbagai pihak. Sesuai dengan teori George C. Edward III, kejelasan dan konsistensi informasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, belum meratanya pemahaman Masyarakat menunjukan bahwa aspek komunikasi belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul telah berjalan dalam aspek penyampaian informasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan pemahaman masyarakat agar tujuan kebijakan dapat dipahami secara lebih menyeluruh oleh seluruh elemen masyarakat desa.

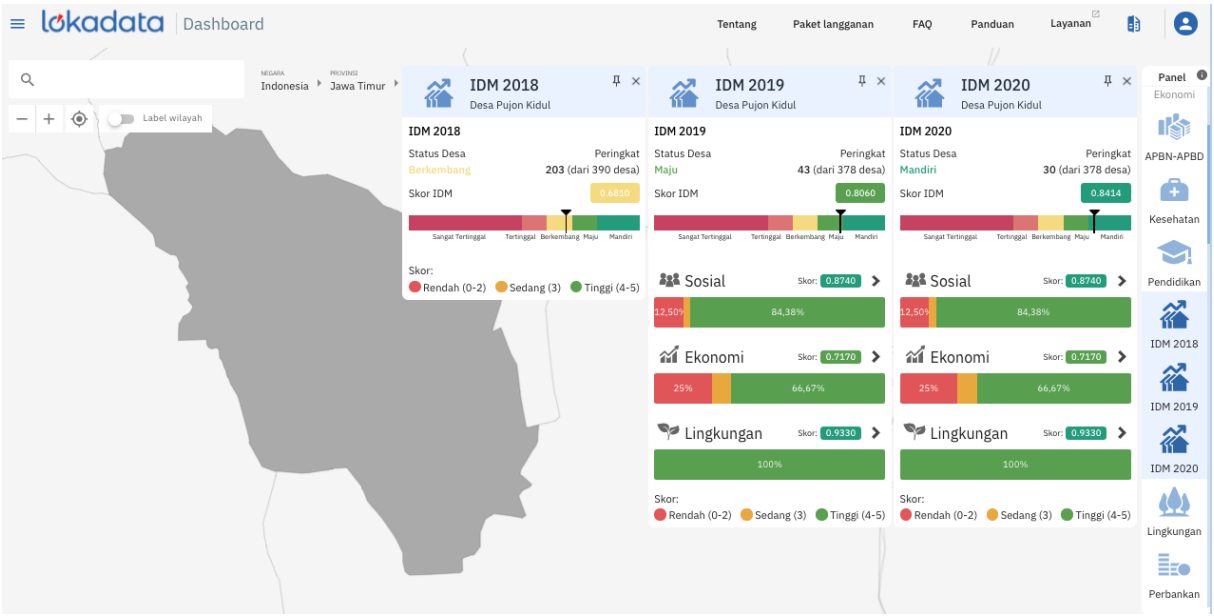
Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan kewenangan. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia dalam pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul melibatkan pemerintah Desa, BUMDes dan Pokdarwis yang memiliki peran masing-masing. Pemerintah desa berperan dalam mengarahkan kebijakan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sedangkan pengelolaan teknis kegiatan wisata dilaksanakan oleh pokdarwis di bawah koordinasi BUMDes. Namun demikian, partisipasi masyarakat secara luas masih belum merata

LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 75-84
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.524

sehingga perlu adanya upaya peningkatan keterlibatan masyarakat.

Dari aspek anggaran, pengembangan desa wisata didukung melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur wisata. Namun, kebutuhan anggaran yang cukup besar, terutama untuk pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas sumber daya mansusia, menjadi kenda sehingga diperlukan penentuan prioritas serta kerja sama dengan pihak lain.



Gambar 1. Perbandingan APBDes dan PADes sebelum dan sesudah menjadi Desa Wisata
Sumber : Data Sekunder, 2025

Berdasarkan gambar 1 pemilihan Kebijakan menjadi Desa Wisata mengubah arah visi dan pendapatan Pemerintah Desa bahkan berdampak pada warga. Beberapa desa memang ada yang memilih visi untuk menjadi desa wisata, ada pula yang memilih untuk menjadi konsep desa yang lain. Pujon kidul dengan menjadi Desa Wisata mampu meningkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri.

Dari sisi fasilitas, akses jalan menuju lokasi wisata telah tersedia dan dapat dilalui kendaraan. Dukungan juga diberikan oleh pemerintah daerah melalui pembangunan infrastruktur pendukung. Namun, beberapa fasilitas masih perlu ditingkatkan seperti penyediaan fasilitas bagi wisatawan saat musim hujan, Fasilitas ramah disabilitas, serta keterbatasan akses transportasi umum.

Dari aspek kewenangan, terdapat pembagian peran antar pemerintah desa, BUMDes dan Pokdarwis. Pemerintah desa menetapkan arah kebijakan, BUMDes berwenang dalam pengelolaan operasional, dan pokdarwis melaksanakan kegiatan wisata di lapangan. Pembagian kewenangan ini menunjukan adaanya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata didukung oleh berbagai sumber daya, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata.

Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan yang

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 75-84
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.524

dikeumukakan oleh George C. Edward III, disposisi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena ini berkaitan dengan kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Dari hasil penelitian, pelaksana kebijakan yang terdiri dari pemerintah desa, BUMDes dan Pokdarwis menunjukan adanya komitmen dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul. Komitmen tersebut terlihat dari keterlibatan dalam pelaksanaan program wisata, koordinasi yang dilakukan secara rutin, serta upaya menjaga keberlanjutan kegiatan wisata meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Selain itu, komitmen pelaksana kebijakan juga terlihat dari upaya pemerintah desa dalam menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan regulasi yang berlaku, termasuk dalam proses perizinan yang mendukung pengembangan desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga berupaya mengimplementasikannya secara aktif.

Dari sisi penerimaan, para pelaksana memandang kebijakan pengembangan desa wisata sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan wisata dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan serta mendorong berkembangnya usaha di sektor pariwisata, sehingga mendorong pelaksana untuk terus menjalankan dan mengembangkan program yang ada. Di sisi lain, pada tingkat masyarakat, disposisi terhadap kebijakan belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh konsep pengembangan desa wisata, sehingga berdampak pada partisipasi dan inisiatif yang belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan pemahaman serta keterlibatan masyarakat melalui pendekatan yang persuasif dan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, aspek disposisi dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul menunjukkan adanya komitmen dan penerimaan dari para pelaksana kebijakan. Komitmen tersebut tercermin dari keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program serta upaya menjaga keberlanjutan kegiatan wisata di tingkat desa. Selain itu, sikap penerimaan terhadap kebijakan juga terlihat dari pandangan para pelaksana yang menganggap pengembangan desa wisata sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, penguatan disposisi pada tingkat masyarakat masih diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yang mencakup pembagian kewenangan serta keberadaan standar operasional procedure (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul melibatkan beberapa Lembaga, yaitu pemerintah desa, BUMDes dan pokdarwis. Pemerintah desa berperan dalam penetapan kebijakan dan pengawasan, BUMDes bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional dan pendanaan, sedangkan pokdarwis berperan sebagai pelaksana kegiatan wisata di lapangan. Pembagian peran ini menunjukan bahwa struktur birokrasi telah terbentuk dengan jelas dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan desa wisata.

Meskipun demikian, struktur birokrasi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh SOP yang terpadu. SOP secara formal baru dimiliki oleh BUMDes, sementara pada tingkat pemerintah desa dan pokdarwis belum terdapat pedoman tertulis yang secara khusus mengatur mekanisme kerja dan koordinasi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan wisata dalam beberapa

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 75-84
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.524

situasi masih bergantung pada kebiasaan kerja dan kesepakatan antar pelaksana.

Selain itu, keterbatasan kewenangan Pokdarwis dalam pengambilan keputusan serta mekanisme koordinasi yang harus melalui BUMDes dan pemerintah desa dalam beberapa kegiatan turut memengaruhi efektivitas dan kecepatan pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul telah menunjukkan adanya pembagian peran antar lembaga, namun masih memerlukan penguatan, terutama melalui penyusunan SOP yang lebih terpadu guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul didukung oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses pengelolaannya. Dukungan tersebut tidak hanya berasal dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari kerja sama antar aktor, keselarasan tujuan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Salah satu faktor utama adalah sinergi antar pemangku kepentingan melalui penerapan konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media. Keterlibatan berbagai pihak ini memberikan kontribusi dalam bentuk promosi, pembinaan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Kolaborasi lintas sektor tersebut berperan dalam membantu mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi desa.

Selain itu, keselarasan visi dan misi antara pemerintah desa, BUMDes, serta unsur kelembagaan desa lainnya turut mendukung konsistensi dalam pengelolaan desa wisata. Kesamaan arah kebijakan ini mempermudah proses pengambilan keputusan dan menjaga keberlanjutan program yang dijalankan.

Peran aktif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan di lapangan. Pokdarwis terlibat dalam pengelolaan unit usaha wisata, pelayanan kepada pengunjung, kegiatan promosi, serta penyelenggaraan wisata edukasi. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diimplementasikan melalui kegiatan nyata. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul. Masyarakat terlibat langsung dalam berbagai aktivitas wisata, seperti pemanfaatan sektor pertanian, peternakan, dan kehidupan sosial sebagai daya tarik wisata edukasi.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dalam pengembangan desa wisata. Secara keseluruhan, faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul meliputi sinergi antar pemangku kepentingan, keselarasan visi dan misi, peran aktif Pokdarwis, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal. Faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul tidak hanya didukung oleh berbagai faktor, tetapi juga dihadapkan pada sejumblah kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanannya. Kendala tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, baik dari aspek finansial, sumber daya manusia, maupun pemahaman masyarakat terhadap konsep desa wisata.

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 75-84
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.524

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Ketergantungan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap dana desa membatasi ruang gerak dalam pengembangan program wisata, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana, kegiatan promosi, serta pengembangan sektor pendukung pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih bergantung pada kapasitas internal desa dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat. Meskipun telah dilakukan pelatihan dan pendampingan, jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang manajemen, pemasaran, dan pengelolaan pariwisata masih terbatas. Di sisi lain, kebijakan yang memprioritaskan masyarakat lokal serta kecenderungan tenaga terdidik bekerja di luar desa turut mempengaruhi ketersediaan SDM yang kompeten.

Faktor lainnya adalah keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat mengenai konsep desa wisata. Sebagian masyarakat masih memaknai wisata sebagai objek berskala besar, sehingga belum sepenuhnya memahami potensi wisata berbasis aktivitas lokal, budaya, dan edukasi yang menjadi karakteristik desa wisata. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Beberapa fasilitas penunjang, seperti area parkir, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya masih memerlukan pengembangan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan bagi wisatawan. Ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang keberlanjutan aktivitas pariwisata. Secara keseluruhan, faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya, kapasitas pengelolaan, dan pemahaman masyarakat, yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul telah berjalan efektif melalui keterlibatan berbagai aktor, yaitu pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat. Ditinjau dari teori implementasi kebijakan, aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan kebijakan, meskipun masih terdapat keterbatasan, terutama pada pemahaman masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi sinergi antar pemangku kepentingan, keselarasan visi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan potensi lokal. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas dan optimalisasi sumber daya guna mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.

Krisnawati, I. 2021. Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi,* 4(2), 211–221.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed., T. R. Rohidi, Trans.). Jakarta : UI Press.

Naibaho, W., Nurcahyanto, H., & Marom, A. 2023. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 274–294.

Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. 2021. Pengelolaan desa wisata dengan konsep green economy dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 (Studi pada desa wisata di Provinsi Lampung dan Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi dan Pajak,* 22(2), 564–572.

Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Membangun desa wisata bagian 1: Konsep dasar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nugroho, T. 2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Krakal Di Kabupaten Gunungkidul. The Journalish: Social and Government, 3(1), 35–42.

Pemerintah Desa Pujon Kidul. (2023). *Buku profil Desa Pujon Kidul tahun 2023* (Draf tidak dipublikasikan).

Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2016). *Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Andi.

Puansah, I. (2023). *Pengembangan wisata daerah*. Padangsimpuan : CV. Alfa Pustaka.

Sari, N. P. 2022. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Era Digital. Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Regional, 10(2), 45–55.

Setyawan, D. 2017. *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. Malang: Intrans Publishing.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syahruddin. (2019). *Implementasi kebijakan publik: Konsep, teori dan studi kasus*. Yogyakarta : Nusamedia.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.